



Konstruksi Makna Pegawai terhadap MONSAKTI dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Febbyana Andra Vesco*, Fachruzzaman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, 38122, Bengkulu, Indonesia

Email: ^{1,*}febbyana2004@gmail.com, ²fachruzzaman.ca@unib.ac.id

Email Penulis Korespondensi: febbyana2004@gmail.com

Abstrak—Transformasi digital dalam tata kelola keuangan publik menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis daring. Salah satu implementasinya adalah penggunaan aplikasi MONSAKTI di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu sebagai instrumen monitoring pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan pegawai terhadap peran MONSAKTI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman, persepsi, serta konstruksi makna pegawai sebagai pengguna sistem. Informan berjumlah delapan orang yang berasal dari Subbagian Keuangan dan BMN, dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan MONSAKTI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara bertahap melalui proses pengorganisasian data, reduksi informasi, penyajian temuan, identifikasi pola, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga kredibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan pegawai terhadap MONSAKTI terbentuk secara berlapis melalui empat pola utama, yaitu legitimasi instrumental melalui kemudahan monitoring dan efisiensi administratif, rekonfigurasi akuntabilitas melalui pengawasan digital dan rekam jejak aktivitas kerja, transparansi yang bersifat terstruktur berdasarkan hierarki kewenangan organisasi, serta diferensiasi pemaknaan berdasarkan posisi dan pengalaman kerja pegawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna membangun pemahaman terhadap fungsi sistem dalam praktik birokrasi sehari-hari. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai digitalisasi keuangan sektor publik dari perspektif pemaknaan pengguna, dengan menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap MONSAKTI terbentuk secara berlapis melalui pengalaman kerja, fungsi pengawasan digital, transparansi terstruktur, serta perbedaan posisi organisasional. Temuan ini memperluas kajian transformasi digital sektor publik yang selama ini lebih berfokus pada efektivitas sistem administratif..

Kata Kunci: MONSAKTI; Pemaknaan Pegawai; Transparansi; Akuntabilitas; Digitalisasi Keuangan Publik

Abstract—Digital transformation in public financial governance demands increased transparency and accountability through the use of online-based information systems. One implementation is the use of the MONSAKTI application at the Bengkulu Province National Land Agency (BPN) Regional Office as a financial management monitoring instrument. This study aims to analyze employee interpretations of MONSAKTI's role in supporting transparency and accountability in public financial management. The study uses an interpretive qualitative approach with a phenomenological perspective to understand the experiences, perceptions, and construction of meaning for employees as system users. Eight informants from the Finance and BMN Subdivisions were selected purposively based on their direct involvement in the use of MONSAKTI. MONSAKTI. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed in stages through the process of organizing data, reducing information, presenting findings, identifying patterns, and drawing conclusions using triangulation techniques to maintain data credibility. The results of the study indicate that employees' meaning of MONSAKTI is formed in layers through four main patterns, namely instrumental legitimacy through ease of monitoring and administrative efficiency, reconfiguration of accountability through digital supervision and work activity track records, structured transparency based on the hierarchy of organizational authority, and differentiation of meaning based on employee position and work experience. The research findings indicate that the success of public financial digitalization is not only determined by the quality of technology, but also by the ability of users to build an understanding of the system's functions in everyday bureaucratic practices. This research contributes to the development of understanding of public sector financial digitalization from a user-defined perspective, by demonstrating that employees' understanding of MONSAKTI is formed in layers through work experience, digital oversight functions, structured transparency, and differences in organizational positions. These findings expand studies of public sector digital transformation, which have previously focused more on the effectiveness of administrative systems.

Keywords: MONSAKTI; Employee Definition; Transparency; Accountability; Digitalization of Public Finance

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola keuangan publik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah mekanisme birokrasi keuangan yang sebelumnya bersifat manual menjadi terintegrasi, transparan, dan berbasis data real-time. Pemerintah mendorong penerapan e-budgeting, cloud accounting, serta berbagai aplikasi keuangan daring guna memastikan kecepatan, akurasi, dan keterbukaan pelaporan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan publik berbasis digital (Lastanti & Djasuli, 2024). Dalam konteks pemerintahan modern, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan (Nurfadila, 2024) yang sejalan dengan prinsip *good governance* sebagai dasar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara Natision et al. (2022).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring SAKTI (MONSAKTI). Di tingkat daerah, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu menerapkan sistem ini untuk mendukung





transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan serta pelaporan keuangan. MONSAKTI berfungsi sebagai alat pemantauan berbasis data real-time yang terhubung dengan sistem Kementerian Keuangan Setiawan & Munandar, (2025), dilengkapi fitur *to-do list* dan *dashboard monitoring* guna meningkatkan ketepatan pelaporan serta pengawasan internal Salsabila & Laksmi, (2023). Selain berfungsi sebagai alat pemantauan pelaksanaan keuangan, MONSAKTI juga memiliki peran sebagai bentuk perlindungan administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem ini menyimpan rekam jejak aktivitas administrasi secara digital sehingga dapat menjadi bukti dokumentasi apabila diperlukan dalam proses audit maupun pemeriksaan administratif. Dengan demikian, keberadaan MONSAKTI tidak hanya berkaitan dengan fungsi kontrol, tetapi juga mendukung tertib administrasi serta perlindungan terhadap proses pertanggungjawaban keuangan instansi.

Dalam praktik implementasinya, penggunaan MONSAKTI pada tahap awal tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Pada tiga bulan pertama penerapan sistem, beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam proses unggah dokumen pertanggungjawaban serta keterbatasan akses akibat stabilitas sistem yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembaruan data serta perbedaan pemahaman antarpegawai dalam menafsirkan indikator yang ditampilkan pada dashboard monitoring. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan menginterpretasikan informasi yang disediakan oleh sistem. Temuan ini sejalan dengan Maulidi, M.R. et al. (2025) yang menunjukkan bahwa variasi cara pandang pegawai terhadap sistem monitoring, baik sebagai beban administratif maupun sarana peningkatan akuntabilitas, memengaruhi pemanfaatannya dalam praktik kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan implementasi tidak hanya bersumber dari kendala teknis, tetapi juga dari dimensi pemaknaan pengguna terhadap sistem.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada *Technological Frames Theory* menjelaskan bahwa individu dalam organisasi membangun pemahaman terhadap teknologi berdasarkan pengalaman, persepsi, serta konteks kerja yang memengaruhi cara teknologi dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dalam konteks tata kelola digital sektor publik, efektivitas implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami fungsi teknologi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi Aarab et al. (2025). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pegawai memaknai penggunaan MONSAKTI, termasuk bagaimana mereka menilai manfaat, keterbatasan, serta implikasi sistem terhadap pekerjaan mereka sehari-hari. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap fitur dashboard dan indikator monitoring dapat memengaruhi cara pegawai menginterpretasikan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Sebagai pelengkap, *Stewardship Theory* menekankan bahwa individu dalam organisasi publik cenderung bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang mengutamakan kepentingan organisasi, tanggung jawab kolektif, serta pencapaian tujuan institusi dibanding kepentingan pribadi. Dalam konteks sektor publik, pendekatan *stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas, komitmen kerja, dan tanggung jawab pengelola terhadap sumber daya negara agar tata kelola organisasi berjalan secara efektif Ernst, (2025), sedangkan *Good Governance Theory* menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pengawasan dalam pengelolaan sektor publik. Pada era digital, implementasi sistem informasi keuangan pemerintah berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui mekanisme monitoring yang lebih terintegrasi Lestari, (2025). Dibandingkan model adopsi teknologi seperti *TAM* atau *UTAUT* yang berfokus pada niat penggunaan, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konstruksi makna pengguna dalam konteks birokrasi publik.

Penelitian mengenai digitalisasi keuangan sektor publik menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan pemerintah, termasuk sistem transaksi dan monitoring berbasis digital, berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administratif, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan. Gultom & Harahap, (2024) menemukan bahwa implementasi sistem aplikasi keuangan instansi meningkatkan ketepatan dan keteraturan penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah, sementara Lastanti & Djasuli, (2024) menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan arus keuangan publik memperkuat akurasi data serta efektivitas pengawasan anggaran. Dalam konteks tata kelola, (Sari & Muslim, 2023) menyimpulkan bahwa efektivitas teknologi akuntansi publik dipengaruhi oleh integritas aparatur dan budaya transparansi organisasi. Sejalan dengan itu, Maulidi, M.R. et al. (2025) menunjukkan bahwa variasi persepsi pegawai terhadap sistem monitoring keuangan memengaruhi tingkat pemanfaatannya dalam praktik kerja. Penelitian Thaib et al. (2025) juga menegaskan bahwa persepsi dan pemahaman pegawai terhadap sistem informasi dan pengendalian internal berkontribusi terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meskipun penelitian terdahulu, oleh Setiawan & Munandar (2025), telah membahas MONSAKTI dari sisi fungsionalitas sistem dan kontribusinya terhadap kualitas pelaporan keuangan, kajian tersebut masih lebih menekankan aspek administratif dan efektivitas implementasi teknologi. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana pegawai sebagai pengguna membangun dan memaknai peran MONSAKTI dalam praktik kerja sehari-hari. Padahal, dalam konteks birokrasi publik, sistem monitoring digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga dapat memengaruhi pola pengawasan, cara kerja, serta pemahaman pegawai mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemaknaan pegawai terhadap penggunaan MONSAKTI masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks birokrasi daerah dengan pendekatan fenomenologis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pegawai memaknai peran MONSAKTI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi pengalaman penggunaan serta dinamika interpretasi yang membentuk pemahaman pegawai terhadap fungsi MONSAKTI dalam praktik birokrasi sehari-hari. Penelitian ini





memiliki kontribusi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian mengenai implementasi MONSAKTI yang selama ini lebih banyak dibahas dari sisi efektivitas administratif dan kualitas pelaporan keuangan, dengan menghadirkan perspektif pemaknaan pegawai sebagai pengguna sistem melalui pendekatan fenomenologis. Penelitian ini juga menawarkan model konstruksi makna berlapis yang menjelaskan bagaimana pemahaman pegawai terhadap teknologi monitoring keuangan berkembang dari fungsi instrumental menuju penguatan akuntabilitas dan transparansi digital. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi organisasi publik dalam merancang strategi pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital yang lebih adaptif berdasarkan peran pengguna dalam birokrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana pegawai memaknai penggunaan aplikasi MONSAKTI dalam pengelolaan keuangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti melalui eksplorasi makna dan pengalaman partisipan Aspers & Corte, (2021).

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada tanggal 1–31 Januari, di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap penggunaan sistem, serta telaah dokumentasi terkait implementasi MONSAKTI.

Informan penelitian berjumlah delapan orang pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem MONSAKTI. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap implementasi sistem MONSAKTI dalam proses pengelolaan keuangan. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh berasal dari informan yang memiliki relevansi langsung terhadap fokus penelitian Campbell et al. (2020). Kriteria pemilihan informan meliputi:

- 1) Pegawai yang secara langsung menggunakan atau mengoperasikan sistem MONSAKTI dalam pekerjaan sehari-hari;
- 2) Memiliki peran dalam proses pengelolaan keuangan instansi;
- 3) Memahami proses monitoring dan pelaporan keuangan melalui sistem digital.

Delapan informan tersebut terdiri atas berbagai peran operasional dalam pengelolaan keuangan, antara lain kepala bagian Keuangan dan BMN, bendahara pengeluaran, admin satker, serta operator sistem pada bidang komitmen, pembayaran, pelaporan, aset, anggaran, dan persediaan. Variasi peran ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengalaman penggunaan MONSAKTI dalam berbagai fungsi administrasi keuangan.

Tabel 1. Data Informan

Kode Informan	Jabatan/Peran	Keterlibatan dalam Penggunaan MONSAKTI
1	Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	Monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan dan evaluasi progres administrasi
2	Bendahara Pengeluaran	Monitoring status pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
3	Operator Bidang Komitmen	Monitoring progres penyelesaian komitmen dan tindak lanjut administrasi
4	Operator Bidang Anggaran	Monitoring realisasi dan progres administrasi anggaran
5	Operator Bidang Anggaran	Monitoring pelaksanaan dan evaluasi administrasi anggaran
5	Operator Bidang Aset	Monitoring administrasi Barang Milik Negara (BMN)
6	Operator Bidang Pelaporan	Monitoring progres dan kelengkapan pelaporan keuangan
7	Operator Bidang Persediaan	Monitoring administrasi persediaan dan tindak lanjut pelaporan

Berdasarkan **Tabel 1**. Informan penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan MONSAKTI sebagai sistem monitoring pengelolaan keuangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Meskipun proses pencatatan dan penyusunan administrasi keuangan dilakukan melalui aplikasi SAKTI, para informan memanfaatkan MONSAKTI untuk memantau progres pekerjaan, status penyelesaian administrasi, serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai bidang tugas masing-masing. Variasi posisi informan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan pegawai terhadap fungsi MONSAKTI dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan durasi sekitar 15–20 menit untuk setiap informan. Wawancara difokuskan pada pengalaman pegawai dalam menggunakan sistem, pemahaman mereka terhadap fitur monitoring yang tersedia, serta persepsi mengenai peran MONSAKTI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap penggunaan





sistem MONSAKTI, termasuk melihat tampilan dashboard monitoring serta proses pengoperasian sistem dalam kegiatan administrasi keuangan.

Observasi ini didukung oleh pengalaman peneliti yang sebelumnya pernah melihat dan mengoperasikan sistem MONSAKTI selama menjalani kegiatan magang di instansi yang sama. Pengalaman tersebut membantu peneliti memahami konteks penggunaan sistem serta interpretasi informan terhadap fitur yang tersedia dalam aplikasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengorganisasian data, reduksi informasi, penyajian temuan, identifikasi pola, serta penarikan kesimpulan yang berlangsung secara iteratif sepanjang proses penelitian. Analisis diarahkan untuk memahami pola pengalaman, bentuk interpretasi, dan konstruksi makna pegawai terhadap peran MONSAKTI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kredibilitas interpretasi dan konsistensi temuan penelitian kualitatif Nowell et al. (2021).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan yang memiliki peran berbeda dalam pengelolaan keuangan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui penggabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Penerapan triangulasi tidak hanya berfungsi memperkuat kredibilitas data, tetapi juga memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pegawai membangun makna atas penggunaan MONSAKTI dalam praktik tata kelola keuangan melalui perbandingan berbagai perspektif dan sumber informasi Chakma, U., & Li, (2025); Grant et al. (2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Makna Instrumental sebagai Legitimasi Awal Digitalisasi Keuangan

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa pemaknaan pegawai terhadap penggunaan sistem MONSAKTI tidak terbentuk secara langsung sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi atau peningkatan transparansi keuangan. Sebaliknya, pemahaman tersebut berkembang secara bertahap melalui pengalaman pegawai dalam menggunakan sistem pada aktivitas kerja sehari-hari. Pada tahap awal implementasi, sebagian besar informan memaknai MONSAKTI berdasarkan manfaat praktis yang mereka rasakan ketika menjalankan tugas administratif.

Pengalaman penggunaan sistem dalam pekerjaan rutin menjadi faktor penting yang membentuk penerimaan awal terhadap teknologi ini. Pegawai mulai melihat MONSAKTI sebagai alat yang membantu mempercepat proses kerja, mempermudah pemantauan kegiatan, serta meningkatkan keteraturan administrasi keuangan. Pola pemaknaan awal tersebut kemudian dapat diidentifikasi melalui beberapa subtema yang muncul dari hasil wawancara, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Konstruksi Makna Instrumental Pegawai terhadap Penggunaan Sistem MONSAKTI

No	Tema Utama	Subtema	Kutipan Representatif Informan	Makna Analitis
1	Legitimasi Instrumental	Kemudahan Monitoring kegiatan	“Dengan MONSAKTI, monitoring kegiatan dan anggaran jadi lebih mudah.”	Teknologi pertama-tama dimaknai sebagai alat praktis yang menyederhanakan prosedur kerja.
2		Akses data keuangan lebih cepat	“Informasi keuangan bisa langsung diakses tanpa menunggu laporan manual.”	Digitalisasi dipersepsikan meningkatkan kecepatan alur informasi administratif.
3		Ketertiban pelaporan	“Pelaporan lebih tertib karena semua sudah terpantau di sistem.”	Sistem membentuk keteraturan prosedural dalam birokrasi.

Berdasarkan kutipan wawancara pada **Tabel 1**, terlihat bahwa pemaknaan awal pegawai terhadap MONSAKTI berpusat pada manfaat praktis dalam pekerjaan administratif. Kemudahan monitoring kegiatan, percepatan akses terhadap informasi keuangan, serta peningkatan ketertiban pelaporan menjadi pengalaman dominan yang dirasakan oleh para informan. Pengalaman tersebut membuat pegawai memandang sistem sebagai alat yang membantu menyederhanakan prosedur kerja yang sebelumnya lebih kompleks ketika masih menggunakan metode manual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan awal pegawai terhadap MONSAKTI terbentuk melalui pengalaman penggunaan sistem dalam aktivitas administratif sehari-hari. Pegawai lebih dahulu memandang MONSAKTI sebagai alat yang membantu monitoring kegiatan, mempercepat akses informasi keuangan, serta meningkatkan keteraturan pelaporan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan awal terhadap teknologi dalam birokrasi publik lebih banyak dipengaruhi oleh manfaat praktis yang dirasakan pengguna dibanding pemahaman normatif mengenai reformasi tata kelola keuangan.

Dalam perspektif *Technological Frames Theory*, individu membangun pemahaman terhadap teknologi berdasarkan pengalaman penggunaan, persepsi, dan konteks kerja yang memengaruhi cara teknologi dimanfaatkan dalam organisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Aarab et al. (2025), efektivitas implementasi sistem informasi sektor publik





sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna memahami fungsi teknologi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi. Pada konteks penelitian ini, pengalaman administratif pegawai menjadi dasar pembentukan makna terhadap MONSAKTI, sehingga sistem terlebih dahulu dipahami sebagai alat bantu operasional sebelum berkembang menjadi instrumen tata kelola keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lastanti & Djasuli, (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sektor publik dipengaruhi oleh persepsi manfaat sistem dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan arus keuangan. Selain itu, Maulidi, M.R., et al. (2025) menjelaskan bahwa pengalaman pengguna terhadap kemudahan monitoring berbasis digital memengaruhi bagaimana teknologi diterima dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Dari perspektif organisasi, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transformasi digital sektor publik tidak dapat hanya dipahami sebagai proses penggantian sistem manual menjadi sistem elektronik. Digitalisasi juga merupakan proses perubahan sosial dan perilaku kerja yang memerlukan adaptasi pengguna terhadap pola administrasi baru. Ketika pegawai merasakan bahwa sistem mampu mengurangi kompleksitas pekerjaan, meningkatkan efisiensi waktu, dan membantu penyelesaian tugas secara lebih sistematis, maka penerimaan terhadap teknologi akan berkembang secara lebih natural. Sebaliknya, apabila teknologi dipersepsikan menambah hambatan administratif atau tidak relevan dengan kebutuhan kerja, maka proses internalisasi penggunaan teknologi cenderung mengalami resistensi. Dengan demikian, pengalaman pengguna menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi teknologi pada organisasi publik.

Dalam konteks ini, pemaknaan instrumental terhadap MONSAKTI dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi awal digitalisasi keuangan publik. Pegawai tidak langsung memosisikan sistem sebagai instrumen reformasi tata kelola, tetapi terlebih dahulu memaknainya sebagai alat bantu kerja yang mempermudah aktivitas administratif sehari-hari. Seiring meningkatnya intensitas penggunaan dan pemahaman terhadap fungsi sistem, pemaknaan tersebut kemudian berkembang menuju aspek yang lebih kompleks, termasuk penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Artinya, manfaat praktis yang dirasakan pengguna berperan sebagai pintu masuk utama dalam membangun penerimaan terhadap inovasi teknologi di lingkungan birokrasi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MONSAKTI pada tahap awal tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem menghasilkan manfaat nyata bagi pekerjaan administratif pegawai. Temuan ini memperdalam kajian transformasi digital sektor publik dengan menunjukkan bahwa legitimasi teknologi dalam birokrasi terbentuk secara bertahap melalui pengalaman praktis pengguna sebelum berkembang menuju fungsi penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

3.2 Rekonfigurasi Akuntabilitas dari Integritas Individu ke Pengawasan Digital

Selain dipahami sebagai alat yang membantu pekerjaan administratif, penggunaan MONSAKTI juga memunculkan perubahan dalam cara pegawai memahami tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan setiap aktivitas administrasi keuangan tercatat secara lebih sistematis dalam bentuk rekam jejak digital.

Kehadiran fitur monitoring dan pencatatan aktivitas dalam sistem membuat proses pekerjaan menjadi lebih mudah ditelusuri. Setiap kesalahan maupun perkembangan pekerjaan dapat terlihat secara langsung melalui sistem. Kondisi ini mendorong munculnya pola perilaku kerja yang lebih berhati-hati karena pegawai menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan dapat dipantau melalui sistem. Beberapa bentuk perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekonfigurasi Akuntabilitas Pegawai dalam Penggunaan Sistem MONSAKTI

No	Tema Utama	Subtema	Kutipan Representatif Informan	Makna Analitis
1	Rekonfigurasi Akuntabilitas	Jejak kesalahan & progres	“Kalau ada kesalahan bisa langsung terlihat di sistem.”	Teknologi berfungsi sebagai mekanisme pelacakan tanggung jawab.
2		Kehati-hatian pegawai	“Kami jadi lebih hati-hati karena semua tercatat.”	Pengawasan digital membentuk disiplin kerja administratif.
3		Dukungan pertanggungjawaban	“Monitoring membantu saat pertanggungjawaban kegiatan.”	Akuntabilitas bergeser dari moral individu ke kontrol sistemik.

Berdasarkan kutipan wawancara pada **Tabel 2**, terlihat bahwa penggunaan MONSAKTI tidak hanya mempengaruhi cara pegawai bekerja secara administratif, tetapi juga mempengaruhi cara mereka memahami tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Informan menyampaikan bahwa keberadaan sistem membuat setiap kesalahan atau perkembangan pekerjaan dapat langsung terlihat melalui monitoring sistem.

Kondisi ini menyebabkan pegawai bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi karena aktivitas yang mereka lakukan tercatat dalam sistem. Dengan demikian, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tidak lagi hanya bergantung pada komitmen moral individu, tetapi juga diperkuat oleh mekanisme pengawasan yang tersedia dalam sistem digital.

Dalam konteks *Stewardship Theory* Ernst, (2025) yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, aparaturnya publik dipandang sebagai pihak yang memiliki orientasi pada kepentingan organisasi dan bertanggung jawab terhadap





pencapaian tujuan institusi. Dalam penelitian ini, MONSAKTI berperan sebagai mekanisme penguat yang memperluas praktik *stewardship* melalui sistem monitoring berbasis digital. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga dilembagakan melalui sistem yang memungkinkan pelacakan aktivitas kerja secara real-time. Temuan ini sejalan dengan Sari & Muslim, (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik meningkat ketika sistem informasi keuangan mampu menyediakan jejak audit digital yang jelas dan terstruktur. Penelitian Setiawan & Munandar, (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan MONSAKTI berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui mekanisme monitoring yang lebih sistematis. Selain itu, Gultom & Harahap, (2024) menegaskan bahwa sistem aplikasi keuangan instansi memperkuat ketertiban administrasi melalui digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan.

Jika ditelaah lebih mendalam, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola akuntabilitas dalam organisasi publik. Pada sistem kerja konvensional, pertanggungjawaban pekerjaan lebih banyak mengandalkan pelaporan manual dan kepercayaan terhadap aparat yang menjalankan tugas. Sementara itu, dalam sistem digital seperti MONSAKTI, akuntabilitas berkembang menjadi lebih sistemik karena didukung oleh bukti administrasi yang terdokumentasi secara otomatis. Pergeseran ini tidak berarti menghilangkan pentingnya integritas individu, melainkan memperkuatnya melalui mekanisme kontrol berbasis data. Dengan demikian, hubungan antara pegawai dan organisasi dalam konteks pertanggungjawaban menjadi lebih terstruktur karena sistem menyediakan mekanisme evaluasi yang lebih jelas dan terukur.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga mengubah mekanisme akuntabilitas dalam organisasi publik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa pengawasan digital menciptakan bentuk akuntabilitas baru yang bersifat sistemik, di mana tanggung jawab pegawai tidak hanya dinilai dari komitmen individu, tetapi juga dari jejak digital yang dihasilkan oleh sistem.

Implikasi penting terhadap praktik akuntabilitas dalam birokrasi. Kehadiran sistem monitoring digital seperti MONSAKTI memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dengan menyediakan rekam jejak aktivitas kerja yang dapat ditelusuri secara sistematis. Kondisi ini mendorong terbentuknya perilaku kerja yang lebih hati-hati dan disiplin karena setiap aktivitas administrasi dapat dipantau melalui sistem. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan sistem pengawasan organisasi. Namun demikian, efektivitas pengawasan digital tetap bergantung pada integrasi antara sistem teknologi dan komitmen aparat dalam menjalankan prosedur administrasi secara bertanggung jawab.

3.3 Transparansi Digital dalam Struktur Hierarki Organisasi

Penggunaan sistem MONSAKTI juga mempengaruhi cara pegawai memandang keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan menyampaikan bahwa sistem ini membuat informasi keuangan lebih mudah dipantau dibandingkan dengan proses administrasi manual yang sebelumnya digunakan.

Namun demikian, peningkatan akses terhadap informasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh pegawai dapat melihat seluruh data keuangan organisasi secara bebas. Akses terhadap informasi tetap diatur berdasarkan kewenangan jabatan dan peran masing-masing pegawai dalam sistem. Pola transparansi yang muncul dalam implementasi MONSAKTI dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Temuan Transparansi Terstruktur dalam Implementasi MONSAKTI

No	Tema Utama	Subtema	Kutipan Representatif Informan	Makna Analitis
1	Transparansi Hierarkis	Keterbukaan informasi	“Data keuangan lebih transparan karena bisa dipantau.”	Digitalisasi meningkatkan visibilitas informasi organisasi.
2		Akses terbatas kewenangan	“Tidak semua pegawai bisa melihat seluruh data.”	Transparansi bersifat selektif mengikuti hierarki birokrasi.
3		Hierarki kontrol data	“Akses sesuai jabatan masing-masing.”	Teknologi mereproduksi struktur kekuasaan organisasi.

Data pada **Tabel 3** menunjukkan bahwa penggunaan MONSAKTI meningkatkan visibilitas informasi keuangan dalam organisasi. Informasi yang sebelumnya harus diperoleh melalui laporan manual kini dapat diakses secara lebih cepat melalui sistem digital. Kondisi ini membuat proses pemantauan data keuangan menjadi lebih mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh sistem ini tidak bersifat terbuka sepenuhnya bagi seluruh pegawai. Akses terhadap data tetap diatur berdasarkan struktur jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam sistem MONSAKTI berjalan seiring dengan mekanisme pengaturan akses yang mengikuti struktur organisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi melalui MONSAKTI tidak serta-merta menghasilkan keterbukaan informasi secara penuh bagi seluruh pegawai. Meskipun sistem memungkinkan informasi keuangan dipantau lebih cepat dibandingkan prosedur manual, akses terhadap data tetap dibatasi berdasarkan kewenangan





dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak menghapus struktur hierarki organisasi, melainkan merepresentasikannya kembali dalam bentuk pengaturan akses digital yang lebih sistematis. Dengan demikian, transparansi dalam konteks birokrasi digital bersifat selektif dan terstruktur, bukan keterbukaan tanpa batas.

Dalam konteks *Good Governance Theory* Lestari, (2025), transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik birokrasi, transparansi tidak selalu berarti keterbukaan tanpa batas, melainkan diatur melalui sistem otorisasi untuk menjaga keamanan data dan efektivitas pengendalian internal organisasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari & Muslim, (2023) yang menegaskan bahwa transparansi dalam sektor publik harus diimbangi dengan mekanisme kontrol internal agar sistem tetap berjalan efektif. Selain itu, Gultom & Harahap, (2024) menemukan bahwa efektivitas sistem keuangan digital sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain sistem dan struktur organisasi yang ada.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam organisasi publik sering kali tidak mengubah struktur birokrasi secara fundamental, melainkan menyesuaikan teknologi dengan pola organisasi yang telah ada sebelumnya. MONSAKTI pada praktiknya tidak menghapus relasi kewenangan antarjabatan, tetapi mereproduksi pola tersebut melalui sistem otorisasi pengguna. Dengan kata lain, hierarki birokrasi yang sebelumnya dijalankan melalui prosedur administratif manual kini diintegrasikan ke dalam mekanisme kontrol digital. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi dalam organisasi publik cenderung bersifat adaptif terhadap struktur kelembagaan dibanding menciptakan perubahan struktural secara menyeluruh.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem digital tidak selalu berarti keterbukaan informasi secara penuh bagi seluruh anggota organisasi. Dalam praktiknya, transparansi tetap diatur melalui mekanisme kewenangan dan pembatasan akses yang mengikuti struktur organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa desain sistem informasi keuangan pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pengaturan otorisasi pengguna. Dengan demikian, transparansi digital dapat berfungsi secara efektif tanpa mengabaikan kebutuhan pengendalian internal dan keamanan data dalam organisasi birokrasi.

3.4 Diferensiasi Pemaknaan Teknologi Berdasarkan Posisi Organisasi

Selain membentuk perubahan dalam proses kerja dan mekanisme akuntabilitas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemaknaan pegawai terhadap penggunaan MONSAKTI tidak selalu sama. Perbedaan pengalaman penggunaan sistem serta peran fungsional pegawai dalam organisasi mempengaruhi cara mereka memahami keberadaan teknologi tersebut.

Pegawai yang berperan langsung sebagai operator sistem cenderung melihat MONSAKTI sebagai alat yang membantu pekerjaan administratif sehari-hari. Sementara itu, pegawai yang memiliki fungsi koordinasi atau pengawasan dalam pengelolaan keuangan lebih sering memaknai sistem sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja administrasi keuangan. Perbedaan pemaknaan ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Diferensiasi Pemaknaan Teknologi Berdasarkan Posisi Organisasional

No	Tema Utama	Subtema	Kutipan Representatif Informan	Makna Analitis
1	Diferensiasi Makna Organisasional	Pengguna operasional terbantu	“Sangat membantu pekerjaan harian kami.”	Makna teknologi dibentuk oleh pengalaman penggunaan langsung.
2		Fungsi pengawasan	“Memudahkan kontrol dan evaluasi.”	Kelompok pengawas melihat teknologi sebagai alat kontrol.
3		Beban administratif tambahan	“Ada juga yang merasa pekerjaan jadi bertambah.”	Implementasi digital memiliki konsekuensi ambivalen.

Berdasarkan kutipan wawancara pada **Tabel 4**, terlihat bahwa pemaknaan terhadap MONSAKTI dipengaruhi oleh posisi dan peran pegawai dalam organisasi. Informan yang berperan sebagai pengguna operasional cenderung menekankan manfaat sistem dalam membantu penyelesaian pekerjaan administratif. Sebaliknya, informan yang memiliki tanggung jawab koordinasi atau pengawasan lebih melihat sistem sebagai alat untuk memantau proses kerja dan memastikan kesesuaian pelaporan keuangan.

Selain manfaat tersebut, beberapa informan juga menyampaikan bahwa penggunaan sistem digital dapat menambah beban administratif tertentu, terutama pada tahap awal implementasi ketika pegawai masih harus menyesuaikan diri dengan prosedur baru dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sepenuhnya positif, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi yang beragam bagi penggunanya.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pegawai yang memiliki posisi dan tanggung jawab berbeda membangun pemahaman yang berbeda pula terhadap teknologi yang sama. Bagi sebagian pegawai, teknologi dipandang sebagai alat yang mempermudah pekerjaan. Namun bagi kelompok lain, teknologi juga dapat dipersepsikan sebagai sumber tuntutan administratif baru yang perlu disesuaikan dalam praktik kerja sehari-hari.





Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan teknologi dalam organisasi tidak bersifat tunggal, melainkan dikonstruksi berdasarkan pengalaman, peran, dan konteks kerja masing-masing individu. Dalam konteks *Technological Frames Theory* Aarab et al. (2025), perbedaan interpretasi ini terjadi karena setiap individu memiliki kerangka pemahaman yang berbeda terhadap teknologi berdasarkan posisi mereka dalam organisasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nurrahmi et al. (2023), yang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan kebutuhan pengguna di berbagai tingkat organisasi. Oleh karena itu, implementasi sistem digital tidak hanya memerlukan kesiapan teknis, tetapi juga memerlukan proses penyesuaian sosial agar teknologi dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh seluruh pengguna dalam organisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan posisi dan tanggung jawab kerja berpengaruh terhadap cara pegawai memahami fungsi MONSAKTI dalam praktik administrasi keuangan. Pegawai operasional cenderung menekankan manfaat sistem dalam membantu penyelesaian tugas administratif sehari-hari, seperti monitoring progres pekerjaan dan pengecekan status administrasi. Sebaliknya, pegawai yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan lebih memaknai MONSAKTI sebagai instrumen kontrol untuk memastikan kesesuaian proses pelaporan dan pelaksanaan administrasi keuangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan teknologi dalam organisasi tidak bersifat homogen, tetapi dipengaruhi oleh konteks kerja masing-masing pengguna.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem digital pada organisasi publik tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sepenuhnya seragam di antara pegawai. Bagi sebagian pengguna, sistem dipersepsikan membantu efisiensi kerja, sementara bagi pengguna lain teknologi dapat dipandang sebagai tambahan tanggung jawab administratif yang memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MONSAKTI tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh kemampuan organisasi memahami kebutuhan pengguna pada berbagai tingkatan kerja. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan implementasi yang adaptif, seperti pelatihan berbasis peran dan pendampingan penggunaan sistem, agar seluruh pegawai dapat membangun pemahaman yang lebih selaras terhadap fungsi teknologi dalam mendukung tata kelola keuangan.

Temuan mengenai perbedaan pemaknaan teknologi di antara pegawai menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut dipahami oleh pengguna di berbagai posisi organisasi. Perbedaan pengalaman penggunaan sistem dapat memunculkan persepsi yang beragam, mulai dari melihat teknologi sebagai alat yang membantu pekerjaan hingga sebagai sumber beban administratif tambahan. Oleh karena itu, proses transformasi digital dalam organisasi publik perlu disertai dengan strategi pendampingan pengguna, seperti pelatihan berbasis peran dan komunikasi lintas fungsi, agar pemahaman terhadap sistem dapat berkembang secara lebih selaras di seluruh tingkatan organisasi.

3.5 Model Konstruksi Makna Berlapis

Berdasarkan integrasi keempat tema tersebut, penelitian ini mengusulkan model konstruksi makna berlapis dalam penggunaan teknologi monitoring keuangan. Pada tahap awal, pegawai memaknai teknologi secara instrumental berdasarkan manfaat praktis dalam pekerjaan administratif. Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan, pemaknaan tersebut berkembang menuju fungsi pengawasan digital yang membentuk pola akuntabilitas kerja. Selanjutnya, sistem menghasilkan transparansi yang terstruktur sesuai dengan hierarki kewenangan organisasi. Pada tahap akhir, muncul perbedaan pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja serta tanggung jawab masing-masing pegawai dalam pengelolaan keuangan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan pegawai terhadap MONSAKTI terbentuk secara bertahap melalui pengalaman penggunaan dalam praktik kerja sehari-hari. Pada tahap awal, MONSAKTI lebih dahulu dimaknai sebagai sistem monitoring yang membantu pengawasan progres pekerjaan dan administrasi keuangan, kemudian berkembang menjadi sarana pendukung akuntabilitas dan transparansi melalui rekam jejak digital serta monitoring berbasis sistem. Perbedaan posisi dan pengalaman kerja pegawai turut membentuk variasi pemaknaan terhadap fungsi MONSAKTI pada masing-masing bidang. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan mengenai konstruksi makna berlapis dalam penggunaan teknologi monitoring keuangan di sektor publik, yang menunjukkan bahwa penerimaan dan pemanfaatan teknologi tidak bersifat tunggal, tetapi berkembang sesuai pengalaman kerja, struktur organisasi, dan fungsi pengguna. Temuan ini memperluas pemahaman teoritis mengenai transformasi digital sektor publik dengan menempatkan dimensi interpretasi pengguna sebagai faktor penting keberhasilan implementasi sistem. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan di sektor publik tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi membangun pemahaman pengguna melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan kerja pegawai. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu instansi dengan jumlah informan terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan pengalaman penggunaan MONSAKTI pada konteks birokrasi yang berbeda. Selain itu, fokus penelitian yang menitikberatkan pada pengalaman subjektif pegawai menyebabkan temuan sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian pada instansi pemerintah lain, membandingkan pengalaman penggunaan antarorganisasi, atau mengeksplorasi dinamika pemaknaan teknologi





monitoring keuangan melalui pendekatan longitudinal agar perkembangan pemaknaan pengguna terhadap sistem dapat dipahami secara lebih mendalam

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Subbagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu atas dukungan, keterbukaan informasi, serta bantuan selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan akademik, dan pendampingan secara konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyusunan akhir naskah. Selain itu, penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun administratif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENCES

- Aarab, A., Marzouki, A. El, & Boubker, O. (2025). *Integrating AI in Public Governance: A Systematic Review*. 1–36. <https://doi.org/10.3390/digital5040059>
- Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is Qualitative in Research. *Qualitative Sociology*, 599–608. <https://doi.org/10.1007/s11133-021-09497-w>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Walkem, K., Young, S., & Bywaters, D. (2020). *Purposive sampling : complex or simple ? Research case examples*. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Chakma, U., & Li, B. (2025). *International Journal of Educational Methodology Ensuring Trustworthiness Using an Inductive Approach in Qualitative Educational Research : An Autoethnographic Investigation of Two Early Career Researchers Reflecting on PhD Data Analysis*. 11(2), 233–244. <https://doi.org/10.12973/ijem.11.2.233>
- Ernst, M. (2025). Assuming accountability in the absence of control : the role of stewardship management. *Public Management Review*, 00(00), 1–29. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2536154>
- Grant, P. D., Longhurst, J. M., & Thier, M. (2024). *Rural Definition Triangulation : Improving the Credibility and Transferability of Rural Education Research in the United States*. 40(1), 1–12. <https://doi.org/10.26209/JRRE4001>
- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>
- Lastanti, N., & Djasuli, M. (2024). Managing Financial Flows In The Public Sector Through Digital Transformation. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(7), 7542–7548. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1246>
- Lestari, P. A. (2025). *Transparency and Accountability in the Digital Era : Insights from Public*. 3, 195–208. <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.864>
- Maulidi, M.R., Safira, Z., Nabila, J., Mariana, M., & Rahmati, R. (2025). *Digital Transformation in Local Government Enhancing Financial Transparency through the Regional Financial Information System (SIKD)*. *HEI EMA Jur.pdf*. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., Lestari, P. A., & Republic, C. (2022). *Ilomata International Journal of Social Science*. 3(1), 97–116. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2021). *Thematic Analysis : Striving to Meet the Trustworthiness Criteria*. 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurfadila, N. (2024). Enhancing Public Financial Management through Performance Evaluation and Cost Systems. *Advances in Management & Financial Reporting*, 2(1). <https://doi.org/10.60079/amfr.v2i1.264>
- Nurrahmi, N., Kaban, R. F., & Widjaja, H. S. (2023). *Ilomata International Journal of Social Science*. *Journal of Social Science*, 4(3), 376–389. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Salsabila, A. N., & Laksmi, A. C. (2023). *Analisis To Do List Pada Aplikasi MonSAKTI Tahun*. 21(1), 511–521. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art2>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Setiawan, Y., & Munandar, A. (2025). Aplikasi MonSAKTI: Kunci Menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas. *Inovasi*, 12(1), 327–337. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v12i1.p327-337.46969>
- Thaib, F. H., Suryani, A., & Fadjrinn, N. (2025). *Point of View Research Accounting and Auditing Employee Perceptions of Internal Control and Its Impact on Financial Transparency at the Population and Civil Registration Office of Puncak Papua Regency*. 6(2), 1–7. <https://doi.org/10.47090/povraa.v6i2.356>